

**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Hewan Dalam Masa Gaduh
(Studi Kasus Di Sukabumi, Bandar Lampung)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh :

SUWANDI

NPM. 1621030172

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADENINTAN LAMPUNG
1443 H/2021 M**

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP GADAI HEWAN DALAM MASA GADUH

(Studi di Sukabumi, Bandar Lampung)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana (S1) dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh :

**SUWANDI
NPM. 1621030172**

Program Studi: Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

**Pembimbing I : Dr. Iskandar Syukur, M.A.
Pembimbing II : Gatot Bintoro Putro Aji, M.E.Sy.**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H/2021 M**

ABSTRAK

Kegiatan *gaduh* sapi sudah tidak asing di dalam masyarakat, karena banyak sekali masyarakat yang menggunakan *gaduh* sebagai salah satu akad. *Gaduh* itu sendiri merupakan akad kerjasama bagi hasil dalam pemeliharaan hewan. Namun bagaimana jika dalam akad *gaduh* dilakukan secara bersamaan dengan akad gadai? Salah satu kegiatan praktik gadai hewan ini terjadi di kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung yang dikaji dalam judul praktik gadai hewan dalam masa *gaduh*.

Praktik gadai dalam masa *gaduh* ini menimbulkan beberapa masalah yang dituangkan dalam rumusan masalah yaitu bagaimana praktik gadai hewan dalam masa *gaduh* di Sukabumi Bandar Lampung, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik gadai hewan dalam masa *gaduh*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik gadai hewan dalam masa *gaduh* di Sukabumi, Bandar Lampung dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik gadai hewan dalam masa *gaduh*.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), data diperoleh secara langsung dari penelitian lapangan terhadap praktik jual beli makarel kaleng. Metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Metode pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, rekonstruksi data dan Sistematisasi. Analisis data dilakukan menggunakan metode analisis kualitatif dengan menggunakan pola berfikir deduktif.

Praktik Gadai Hewan dalam masa *gaduh* di Sukabumi Bandar Lampung ini tidak di lakukan setiap saat atau sering di lakukan, faktor yang mempengaruhi terjadinya praktik gadai hewan dalam masa *gaduh* ialah dikarenakan adanya kebutuhan mendesak bagi pengelola sapi dan pemilik sapi belum mampu untuk memberikan hasil dari kerjasama pemeliharaan sapi tersebut. Sapi yang di gadaikan adalah hasil dari kerjasama nya dengan pemodal yang telah di pelihara dalam kurun waktu satu tahun. Dalam praktiknya pengelola sapi tersebut menggadaikan sapi yang dipeliharanya kepada kelompok ternak namun tidak dengan persetujuan dari pemilik sapi. Dalam hal ini maka akad kerjasama menjadi *fasakh* karena tidak sesuai dengan prinsip *mudharabah*. Gadai yang di lakukan antara pihak pengelola dan kelompok ternak pun tidak sesuai dengan rukun dan syarat yang di tentukan Islam dimana penggadai seharusnya adalah pemilik sah dari harta atau benda yang di gadaikan.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

SURAT PERNYATAAN

Saya bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Suwandi

NPM : 1621030172

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Hewan Dalam Masa Gaduh** (Studi di Sukabumi, Bandar Lampung)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penulis.

Bandar Lampung, 26 Februari 2021
Penulis

Materai
6000

Suwandi
NPM.1621030172



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suramin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

Tim pembimbing telah membimbing dan mengoreksi skripsi saudara:

Nama : Suwandi

NPM : 1621030172

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Hewan
Dalam Masa Gaduh (Studi di Sukabumi, Bandar
Lampung)

MENYETUJUI

Untuk di munaqayahkan dan dipertahankan dalam sidang
Munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Iskandar Syukur, M.A.

Gatot Bintoro Putro Aji, M.E.Sy.

NIP. 196603301992031002

NIP. 198311232019031005

Mengetahui
Ketua Jurusan Mu'amalah

Khoiruddin, M.S.I.

NIP. 197807252009121002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suramin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skrripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Hewan Dalam Masa Gaduh (Studi di Sukabumi, Bandar Lampung)"
disusun oleh, Suwandi, NPM: 1621030172 Program studi Muamalah,
Telah diujikan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Syariah UIN
Raden Intan pada Hari/Tanggal: 30 Juli 2021.

Tim Penguji

Ketua : H. Rohmat, S.Ag., M.H.I

Sekretaris : Abuzar Alghifari, S.UD., M. Ag.

Penguji 1 : Dr. Jayusman, M.Ag.

Penguji 2 : Dr. Iskandar Syukur, M.A.

Penguji 3 : Gatot Bintoro Putro Aji, M.E.Sy.

Dekan



Dr. Khairuddin Tahmid, M.H.

Nip.196210221993031002

MOTTO

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا
اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

“Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”.

(QS. Al-Jumu'ah (62): 10)

PERSEMBAHAN

Skripsi sederhana ini dipersembahkan dan didedikasikan sebagai bentuk ungkapan rasa syukur, tanda cinta dan kasih sayang, serta hormat yang tak terhingga kepada:

1. Untuk Ayahku tercinta Sujiman dan Ibuku tercinta Sukanti, atas segala jasa, pengorbanan, do'a, motivasi, dukungan moril dan materil serta curahan kasih sayang yang tak terhingga, sehingga dengan upayaku bisa membuat ayah dan mama bangga.
2. Untuk Adik-adikku tercinta Kiki Zhaidah dan wahyunisa Salsabila yang sudah memberi dorongan semangat, do'a, dan dukungan moril maupun materil, serta kasih sayang yang tak terhingga.
3. Untuk seluruh keluarga besarku baik yang ada di Bandar Lampung, maupun di luar Bandar Lampung atas segala do'a dan kasih sayang, dukungan dan motivasi atas keberhasilanku.
4. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Suwandi, lahir di Kota Bandar Lampung pada tanggal 9 Juli 1997, anak pertama dari tiga bersaudara buah cinta kasih dari pasangan Bapak Sujiman dan Ibu Sukanti Adapun pendidikan yang telah ditempuh ialah :

1. SD Negeri 2 Campang Raya Bandar Lampung pada tahun 2003 dan selesai tahun 2009.
2. SMP Negeri 31 Bandar Lampung pada tahun 2009 dan selesai pada tahun 2012.
3. SMA Negeri 6 Bandar Lampung pada tahun 2012 dan selesai pada tahun 2015.
4. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, mengambil program studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah) di Fakultas Syari'ah dan Hukum pada tahun 2016 dan lulus pada tahun 2021.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita kehadiran Allah SWT yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya sehingga dapat terselesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya, dan semoga kita mendapat syafaat beliau di hari yaumul akhir kelak. Aamiin.

Adapun judul skripsi ini “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Hewan Dalam Masa Gaduh”. Skripsi ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Ilmu hukum ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan dan dorongan semangat dari berbagai pihak. oleh karena itu ucapan terimakasih yang sebesar besarnya dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang terlibat atas penulisan skripsi ini. Secara khusus kami ucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Moh Mukri., M,Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini.
2. Dr. Khairuddin Tahmid, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan kesulitan mahasiswa.
3. Khoiruddin, M.S.I. selaku ketua Jurusan Muamalah dan Juhrotul Khulwah, M.S.I. selaku sekretaris jurusan serta Muslim S.H.I., M.H.I selaku Staf Jurusan Muamalah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa membantu memberikan

bimbingan serta arahan terhadap kesulitankesulitan mahasiswanya.

4. Dr. Iskandar Syukur, M.A. selaku dosen pembimbing I sekaligus pembimbing akademik dan Gatot Bintoro Putro Aji, M.E.Sy. selaku dosen pembimbing II yang selalu memberikan masukan, saran, serta meluangkan waktunya untuk meberikan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Bapak H. Rohmat, S. Ag., M.H.I Selaku ketua sidang, Bpk Abuzar Alghifari, S.ud., M,Ag. selaku sekretaris sidang, Bapak Dr. Jayusman, M.Ag. selaku penguji I, Dr. Iskandar Syukur, M.A. selaku penguji II, Gatot Bintoro Putro Aji, M.E.Sy. selaku penguji III yang telah berkenan untuk melaksanakan sidang munaqasyah serta memberi masukan dalam penyelesaian skripsi.
6. Segenap narasumber yang sudah rela membantu untuk terbuatnya skripsi ini.
7. Kepala beserta staf perpustakaan pusat dan Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kemudahan dalam menyediakan referensi yang dibutuhkan.
8. Bapak/ibu dosen fakultas Syariah yang telah mendidik dan membimbing juga seluruh staf kasubbag yang telah banyak mebantu menyelesaikan tugas akhirku.
9. Teman-teman seperjuangan Muamalah angkatan 2016, khususnya para sahabat dan keluarga besar Muamalah C angkatan 2016, yang telah mebantu dan memotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini, serta memberikan warna dan berbagai pengalaman selama empat tahun masa perkuliahan.

10. Sahabat-sahabatku WJ, Jopi Windarsah, Berian Yudha, Arif Budiman, Dinda Alferina G, Dian Pertiwi, dan teman-teman lainnya yang telah mendampingi, memberi semangat, canda tawa, suka duka, doa dukungan, serta pengalaman yang takkan terlupakan.
11. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Semoga bantuan serta segalanya yang telah diberikan oleh semua pihak mendapatkan balasan serta pahala dari yang maha kuasa Allah SWT, Aamiin.

Bandar Lampung, 26 Februari 2021

Penulis

Suwandi

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
PERNYATAAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	4
C. Fokus Penelitian	6
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian	8
F. Manfaat Penelitian	9
G. Kajian Penelitian Terdahulu	10
H. Metode Penelitian	11
I. Sistematika Pembahasan	17

BAB II LANDASAN TEORI

A. Akad.....	17
1. Pengertian Akad	17
2. Dasar Hukum Akad.....	19
3. Rukun dan Syarat Akad	21
B. <i>Mudharabah</i>	30
1. Pengertian <i>Mudharabah</i>	31
2. Dasar Hukum <i>Mudharabah</i>	33
3. Rukun dan Syarat <i>Mudharabah</i>	37
4. Jenis-Jenis <i>Mudharabah</i>	41

5. Konsep <i>Mudharabah</i> di Indonesia	42
6. Batalnya <i>Mudharabah</i>	43

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Wikayah Sukabumi Bandar Lampung	45
1. Kondisi Geografis Sukabumi Bandar Lampung....	45
2. Letak Demografis Sukabumi.....	48
3. Sejarah Berdirinya Kelompok Ternak Sepakat Makmur Bersama.....	50
4. Visi dan Misi Kelompok Ternak Sepakat Makmur Bersama.....	50
5. Struktur Organisasi dan Pembagian Kerja Kelompok Ternak Sepakat Makmur Bersama.....	53
B. Praktik Gadai Hewan dalam Masa <i>Gaduh</i> di Sukabumi Bandar Lampung	56

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Praktik Gadai Hewan dalam Masa <i>Gaduh</i>	59
B. Praktik Gadai Hewan dalam Masa <i>Gaduh</i> Ditinjau dari Hukum Islam	62
1. Subyek.....	64
2. Obyek Akad <i>Gaduh</i>	68
3. Penetapan Bagi Hasil.....	68
4. Ijab dan Qabul	68
5. Pembatalan atau Berakhirnya Kerjasama Bagi Hasil	69

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	71
B. Saran	72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Skripsi ini berjudul “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Hewan Dalam Masa *Gaduh* (Studi Kasus Di Sukabumi, Bandar Lampung)**”. Sebelum melangkah ke pembahasan selanjutnya, terlebih dahulu penulis akan jelaskan tentang maksud definisi yang terkandung di dalam judul skripsi ini agar tidak terjadi kesalahpahaman atau multitafsir dalam memahaminya. Berikut adalah istilah-istilah yang perlu penulis definisikan yaitu:

1. **Tinjauan Hukum Islam** adalah hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas nash Al-Qur'an maupun As-Sunnah untuk mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara universal-relevan pada setiap zaman (waktu).¹ Adapun menurut Amir Syarifudin hukum Islam adalah seperangkat peraturan-peraturan yang berdasarkan wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul, tentang tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua yang beragama Islam.²
2. **Gadai (*Rahn*)** adalah suatu benda atau uang yang digadaikan oleh seseorang yang berhutang dan sewaktu-waktu dapat disita apabila pihak yang berutang tersebut tidak bisa membayar hutangnya. Adapun menurut Ibn Qudamah gadai adalah harta yang dijadikan

¹ Said Agil Husin Al-Munawar, *Hukum islam dan Pluralitas Sosial* (Jakarta: Penamadani, 2004), h. 6.

² Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga* (Yogyakarta: Pustaka baru Press, 2017). h. 15.

sebagai jaminan utang untuk dijadikan sebagai harga pembayar apabila pihak yang berutang tidak dapat membayar utangnya kepada pihak pemberi pinjaman. hal ini berarti gadai dapat dijadikan sebagai alat tukar atau bahkan pengganti bagi pihak yang meminjam uang atau barang.³

3. **Gaduh** adalah sistem bagi hasil dalam usaha pertanian atau peternakan, yang perternakannya diserahkan kepada orang lain dengan perjanjian bagi hasil.⁴

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat ditegaskan bahwa judul skripsi ini adalah Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Hewan Dalam Masa *Gaduh* (Studi Kasus Di Sukabumi, Bandar Lampung), yang akan penulis tinjau melalui hukum Islam.

B. Latar Belakang Masalah

Gaduh adalah suatu bentuk kerjasama bagi hasil dimana pemilik modal atau pemilik hewan ternak mempercayakan pemeliharaan ternaknya kepada penggaduh hewan ternak dengan imbalan bagi hasil.⁵

Mudharabah atau *qiradh* termasuk salah satu bentuk akad *syirkah* (perkongasian). *Mudharabah* adalah bahasa penduduk Irak dan *qiradh* atau *muqaradhah* bahasa penduduk Hijaz. Namun, pengertian *qiradh* dan *mudharabah* adalah satu makna.⁶ Praktik kerjasama *gaduh* sapi ini biasa terjadi di masyarakat dan di perbolehkan menurut islam

³Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), h. 102-103.

⁴Pengertian "Gaduh" (On-line), tersedia di: <https://kbbi.web.id/kelola.html> (06 Februari 2020).

⁵Pengertian "Gaduh" (On-line), tersedia di: <https://kbbi.web.id/kelola.html> (06 Februari 2020).

⁶Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 135

jika akad, rukun dan syaratnya terpenuhi. *Gaduh* sendiri dapat di persamakan dengan sistem bagi hasil *mudharabah* dan telah di jelaskan dalam surat al- muzzamil ayat 20:

﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلَاثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلَاثُهَا وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۚ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۚ عَلِمَ أَن لَّنْ نَّحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۚ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَّرْضَىٰ ۚ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ ۚ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۚ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾

“Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, Maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai Balasan yang paling baik dan yang

paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". (QS. Al-Muzammil (62): 20)

Mudharabah dalam Islam memiliki beberapa unsur, yaitu *shahibul maal* (pemilik modal), *mudharib* (pengelola modal), modal, *darahah*, keuntungan bagi hasil dan *sighat*. Dengan adanya hal-hal di atas maka kerjasama *mudharabah* barulah di katakan sah. Pada faktanya praktik *gaduh sapi* di masyarakat sudah menjadi tradisi untuk dijadikan salah satu kerjasama agar dapat menghasilkan laba.⁷

Praktik gadai hewan dalam masa gaduh yang di lakukan dan terjadi di Sukabumi Bandar Lampung ini keberadaan nya sudah cukup lama, di mulai sejak tahun 2017 yaitu pihak pemodal memiliki sapi dengan kisaran harga Rp. 10.000.000; yang masih berumur 6 bulan. Pihak pemodal bekerjasama dengan pengelola menggunakan sistem *gaduh* (bagi hasil) dengan perjanjian pemeliharaan selama 3 tahun atau mencapai target yang di inginkan. Pemilik modal dan pengelola sepakat jika keuntungan nya di bagi dua yakni 50 persen untuk pemodal dan 50 persen untuk pengelola. Namun pada tahun pertama pemeliharaan tersebut, pengelola membutuhkan uang sebesar Rp. 3.000.000,00 untuk keperluan mendesak. Biasanya dalam sistem *gaduh* pemilik modal memberikan talangan kepada pengelola atau menjual sapi tersebut.

Pemilik modal tidak sanggup memberikan pinjaman dan sapi dirasa belum mencapai target perjanjian kerjasama maka pengelola sapi berinisiatif menggadaikan sapi tersebut pada kelompok ternak

⁷Unsur-unsur mudharabah, <https://zonaekis.com/unsur-unsur-mudharabah/>. (06 Februari 2020)

sapi. Pengelola menggadaikan sapi tersebut tanpa sepengetahuan pemodal dengan opsi kerjasama baru. Sapi di gadaikan selama satu tahun pemeliharaan dengan potongan pembiayaan sebesar Rp. 500.000,00. Dalam perjanjian gadai tersebut pengelola sapi menyerahkan hak pemeliharaan kepada kelompok ternak.

Penulis tertarik untuk mengkaji mengenai praktik gadai hewan dalam masa gaduh tersebut dari pandangan hukum Islam. Alasannya, karena dalam gadai hewan pada masa gaduh atau kerja sama tersebut penerima pengelola menggadaikan sapi yang masih dalam kerjasama tanpa sepengetahuan pemilik modal, yang mana seharusnya pengelola menunaikan amanah nya sebagai pengelola untuk menjaga dan memelihara sapi tersebut sesuai dengan rukun, syarat dan asas-asas akad yang telah ditetapkan serta memenuhi hak dan kewajiban nya sebagai mudharib, agar kerjasama tersebut sah dan legal menurut syariat Islam.

C. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan pada objek masalah yang akan diteliti terlebih dahulu agar tidak terjadi perluasan permasalahan yang nantinya dapat tidak sesuai dengan tujuan penelitian ini. Maka penelitian ini memfokuskan meneliti:

1. Praktik Gadai Hewan dalam Masa *Gaduh* di Sukabumi, Bandar Lampung.
2. Pandangan Hukum Islam terhadap Praktik Gadai Hewan dalam Masa *Gaduh* di Sukabumi, Bandar Lampung.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Praktik Gadai Hewan dalam Masa *Gaduh* di Sukabumi, Bandar Lampung?
2. Bagaimanakah Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Gadai Hewan dalam Masa *Gaduh* di Sukabumi, Bandar Lampung?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik gadai hewan dalam masa *Gaduh* di Sukabumi, Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik gadai hewan dalam masa *Gaduh* di Sukabumi, Bandar Lampung.

F. Signifikansi/Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sebagai bahan referensi mengenai status hukum boleh atau tidaknya melakukan praktik gadai hewan dalam masa *gaduh* bagi masyarakat umum, khususnya pada bidang muamalah dalam penyelesaian praktik gadai.
- b. Memberikan sumbangsih pemikiran secara ilmiah dalam menetralsir keraguan akan status hukum diperbolehkan atau tidaknya dalam tinjauan hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah pemikiran keIslaman pada umumnya, sivitas akademika Fakultas Syari'ah, Jurusan Muamalah pada khususnya. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para pihak yang melakukan transaksi gadai di Sukabumi, Bandar Lampung, terutama dalam hal praktik gadai agar dapat dijalankan sesuai dengan hukum Islam.
- b. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan acuan serta untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya di samping itu kajian terdahulu membantu penelitian dalam memposisikan penelitian serta menunjukkan orsinalitas dari penelitian.

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan (skripsi, tesis, disertasi dan sebagainya).

Kajian yang mempunyai relasi atau keterkaitan dengan kajian ini antara lain:

1. Penelitian Vera Dilla Anggraeni (2016) yang berjudul “Praktik Bagi Hasil Gaduh Sapi Ditinjau Dari Hukum Islam” di Desa

Wirokerten, kecamatan Banguntapan, kabupaten Bantul. Merupakan praktik bagi hasil *muharabah* jika di lihat dari perspektif hukum Islam. Akad yang di gunakan yaitu secara lisan sesuai dengan adat di masyarakat setempat. Hal tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam karena sudah memenuhi syarat dan rukun walaupun terjadi pengingkaran janji. Modal yang di gunakan dalam *gaduh sapi* di desa Wirokerten, kecamatan Banguntapan, kabupaten Bantul berbentuk sapi bukan uang. Hal tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam walaupun menurut minoritas ulama. Sistem operasional pada saat pemeliharaan sapi yaitu pengelola bertanggungjawab penuh selama sapi dalam pemeliharaan. Hal tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam sebab kedua belah pihak sudah sepakat dan tidak merasa keberatan, dilakukan atas dasar suka rela tanpa ada unsur paksaan. Pembagian keuntungan yang dilakukan menurut kebiasaan adat setempat yaitu secara *maro limo* dan *maro bathi*. Hal itu sudah sesuai dengan hukum Islam karena sudah jelas prosentase dari keuntungan yang akan didapat masing-masing pihak. Terhadap penanggungan resiko yang terjadi di Desa Wirokerten ditanggung bersama antara pemilik modal dengan pemelihara. Hal itu sudah sesuai dengan hukum Islam jika dilihat dari permasalahan yang terjadi.⁸

2. Penelitian Abdur Rohman A (2020) yang berjudul “Tinjauan hukum islam terhadap sistem bagi hasil pemeliharaan hewan ternak” di desa Sukadana Jaya kecamatan Sukadana kabupaten

⁸ Vera Dilla Anggraeni, “Praktik Bagi Hasil Gaduh Sapi Ditinjau Dari Hukum Islam: di Desa Wirokerten, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul (Skripsi, Universitas Muhamadiyah Ygyakarta, 2016), xv.

Lampung Timur jika di tinjau dari hukum Islam adalah boleh karena sudah memenuhi rukun dan syarat sesuai ketentuan syariat islam. Akad yang dilakukan oleh para pihak yaitu akad mudharabah dalam pembagian keuntungan harus jelas dan ada potongan biaya terlebih dahulu, tetapi pada kenyataannya pembagian keuntungan jika hewan ternak tersebut di kelola dalam keadaan belum pernah beranak, maka jika beranak akan di miliki oleh pengelola, tanpa dibagi.

Setelah itu, jika beranak kembali maka akan dibagi dua dan seterusnya. Dan jika hewan ternak tersebut dikelola dalam keadaan sudah pernah beranak, maka jika beranak dibagi dua, setengah untuk pemilik hewan ternak dan setengah nya lagi untuk pengelola dan seterusnya. Dan pembagian keuntungan tersebut tidak di potong biaya-biaya tak terduga dari pengelola. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hukum Islam terhadap sistem bagi hasil pemeliharaan hewan ternak di Desa Sukadana Jaya Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan bagi hasil hewan ternak di Desa Sukadana Jaya kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur pada prakteknya Menggunakan sistem kekeluargaan karena hanya menggunakan perjanjian lisan, tanpa adanya surat-menyurat dan saksi dari aparat Desa. Dalam bagi hasilnya tidak ada perhitungan terlebih dahulu untuk keperluan atau pengeluaran yang dilakukan oleh pengelola untuk hewan ternak. Dan Hewan ternak sapi maupun kambing dalam bagi hasil

nya yaitu ketika dalam keadaan belum pernah beranak jika beranak langsung di miliki oleh pengelola tanpa di bagi.⁹

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan maksudnya adalah penelitian yang permasalahannya memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan terperinci mengenai latar belakang keadaan sekarang yang terjadi di masyarakat, yang dipermasalahkan dan dikaji penulis dalam penelitian.¹⁰ Yang bersumber dari buku, majalah, artikel, maupun naskah-naskah lainnya yang menjelaskan tentang gadai.¹¹ Sebagai salah satu bahan pendukung bagi penulis dalam melakukan suatu penelitian. Dalam hal ini penulis akan langsung mengamati praktik gadai hewan dalam masa gaduh di sukabumi, bandar lampung.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis maksudnya adalah suatu metode berupa gambaran secara sistematis dan cermat, fakta-fakta aktual dan sifat-sifat populasi tertentu yang datanya penulis dapatkan di

⁹ Abdur Rohman A, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Bagi Hasil Pemeliharaan Hewan Ternak: di Desa Sukadanya Jaya Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metr, 2020), vi.

¹⁰Nurul Zuriyah, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), h. 15.

¹¹Koentjaraningrat dalam Soedjatmoko (dkk), *Historigrafi Indonesia Sebuah Pengantar* (Jakarta: Gramedia, 1995), h. 256.

lapangan berupa gambar-gambar atau foto-foto.¹² Penelitian deskriptif analisis ini dipergunakan penulis untuk memperoleh data penelitian yang sebenarnya.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah cerita atau penuturan atau catatan dari para saksi mata mengenai terjadinya suatu peristiwa. Dokumen dan catatan yang ditulis oleh saksi mata berkenaan dengan suatu peristiwa yang terjadi.¹³ Dalam hal ini data primer yang diperoleh penulis bersumber dari pelaku praktik gadai itu sendiri yaitu dengan memberikan penjelasan berupa wawancara serta memberikan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah cerita atau penuturan mengenai suatu peristiwa yang tidak disaksikan langsung oleh pelapor, melainkan semata-mata melaporkan apa yang dituturkan atau ditulis oleh orang yang menyaksikan peristiwa tersebut. Sumber data sekunder cenderung agak lemah karena adanya kesalahan yang mungkin timbul sewaktu informasi ditularkan dari orang ke orang. Dalam hal ini data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library reseach*), yaitu dengan mengumpulkan data secara dokumentatif, biasanya berupa buku teks sejarah dan ensiklopedia atau karya ilmiah

14. ¹²Moh Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), h.

¹³ Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan ...*, h. 56.

lainnya yang ditulis selang beberapa lama setelah terjadinya peristiwa yang sebenarnya dan berkaitan dengan topik penelitian penulis.¹⁴

c. Partisipan dan Tempat Penelitian

Dalam suatu penelitian yang bersifat kualitatif tentu saja membutuhkan seseorang untuk dijadikan informan penelitian yang mana dalam penelitian ini, penulis mengambil atau mencari 3 (tiga) orang sebagai informan yang terdiri dari 1 (satu) orang pengelola sapi, 1 (satu) orang anggota kelompok sebagai saksi dan 1 (satu) orang ketua kelompok ternak sapi sebagai penerima gadai tersebut. Dengan demikian, penulis berharap mendapatkan informasi secara detail dan sesuai dengan rumusan masalah. Sedangkan untuk tempat penelitian dan para informan dalam penelitian ini, penulis melibatkan pelaku sistem gaduh dan pelaku gadai hewan yang ada di Sukabumi, bandar lampung.

4. Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.¹⁵ Pengamatan yang dilakukan peneliti harus berfokus pada jalur tujuan penelitian yang dilakukan, serta dilakukan secara sistematis melalui

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h.70.

perencanaan yang matang.¹⁶ Observasi dilakukan untuk mengumpulkan data secara langsung guna memperoleh data yang baik, utuh dan akurat. Serta metode ini digunakan untuk mengetahui gambaran umum objek penelitian. Observasi sendiri dapat dibagi berdasarkan cara pendekatannya dan juga cara partisipasinya. Pada praktiknya penulis melakukan pencatatan, dengan menggunakan alat-alat elektronik, seperti video, *tape recorder*, dan jenis lainnya, yang dimana observasi ini dilakukan agar penulis dapat mengingat hasil observasi yang telah disurvei oleh penulis.

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.¹⁷ Wawancara dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada masalah, tujuan, dan hipotesis penelitian. Dalam wawancara selalu ada dua pihak yang masing-masing mempunyai kedudukan yang berlainan. Pihak yang satu berkedudukan sebagai sebagai peminta informasi dan pihak lainnya sebagai pemberi informasi. Pada praktiknya penulis menyiapkan beberapa pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada para pelaku praktik gadai hewan dalam masa *gaduh*.

¹⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h.66.

¹⁷ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, h.83.

c. Dokumentasi

Dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen, yang biasanya berbentuk tulisan maupun gambar. Data-data yang dikumpulkan dengan teknik dokumentasi ini cenderung menggunakan data sekunder.¹⁸ Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa gambar-gambar yang berkaitan dengan praktik gadai hewan dalam masa *gaduh*.

5. Pengolahan Data

a. Editing Data

Editing yaitu melakukan pemeriksaan kembali terhadap data-data atau bahan-bahan yang telah diperoleh untuk mengetahui apakah catatan itu cukup baik dan dapat segera disiapkan untuk keperluan proses berikutnya.¹⁹

b. Klasifikasi Data

Klasifikasi merupakan usaha pengklasifikasian jawaban dari para responden menurut macamnya yang harus dilakukan secara konsisten.

c. Verifikasi Data

Verifikasi merupakan pengelompokkan data dalam memahami maksud dari sumber-sumber data yang telah diperoleh penulis.

¹⁸ Husaini Usman, Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 69.

¹⁹ Noer Saleh dan Musanet, *Pedoman Membuat Skripsi* (Jakarta: Gunung Agung, 1989), h.16.

d. Sistematisasi Data

Sistematisasi merupakan proses penyusunan dan penempatan data menurut kerangka sistematika berdasarkan urutan masalah.²⁰

6. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah proses pencarian dan penyusunan data yang sistematis melalui data wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi yang secara akumulasi menambah pemahaman penulis.²¹ Adapun analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan menggunakan pendekatan berfikir secara induktif.

Analisis kualitatif adalah suatu prosedur yang dilakukan secara beratahap yaitu ketika penulis mendapatkan data, maka data tersebut dapat langsung dianalisa sehingga menjadi data yang valid. Kemudian setelah semua data terkumpul maka dilakukan analisa berlapis serta dikembangkan melalui imajinasi berfikir yang kritis.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan secara keseluruhan dalam penelitian ini terdiri dari 3 bagian yaitu:

Pertama, bagian formalitas yang terdiri dari: halaman judul, abstrak, surat pernyataan, halaman persetujuan, halaman pengesahan,

²⁰ Moh Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, h. 75-81.

²¹ Husaini Usman, Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, h.

halaman motto, halaman persembahan, daftar riwayat hidup, daftar isi.

Kedua, bagian isi terdiri dari 5 bab, yakni bab I tentang pendahuluan. Bab ini terdiri dari beberapa sub bab, yakni penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, sistematika pembahasan. Hal ini dimaksudkan sebagai kerangka awal dalam mengantarkan isi pembahasan kepada bab selanjutnya.

Bab II berisi tentang landasan teori, landasan teori yang di gunakan dalam tema penelitian yang meliputi akad dan mudharabah.

Bab III berisi tentang deskripsi objek penelitian berisi: gambaran umum objek, penyajian fakta dan data penelitian, lokasi dan subjek penelitian, teknik pengumpulan data.

Bab IV berisi tentang pembahasan dan pengembangan dari data penelitian untuk di jadikan temuan.

Bab V tentang penutup, yaitu meliputi kesimpulan dan rekomendasi.

Sementara bagian ketiga dalam penulisan penelitian ini adalah bagian yang berisi tentang daftar pustaka, lampiran

BAB II KAJIAN TEORI

A. Akad

1. Pengertian Akad

Akad berasal dari bahasa Arab *al-aqdu* dalam bentuk jamak nya disebut *al-uqud* yang memiliki arti ikatan atau tali simpul. Menurut ulama *fiqh*, kata akad didefinsikan sebagai hubungan antara *ijab* dan *qabul* sesuai kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum dalam objek perikatan.²²

Pencantuman kata-kata yang “sesuai dengan kehendak syariat” maksudnya bahwa seluruh perikatan yang di lakukan oleh dua pihak atau lebih tidak di anggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syara”. Misalnya, kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain, atau merampok kekayaan orang lain. Adapun pencantuman kata-kata “berpengaruh kepada objek perikatan” maksudnya adalah terjadinya perpindahan pemilikan dari satu pihak (yang melakukan *ijab*) kepada pihak lain (yang menyatakan *qabul*).²³

Mayoritas Fuqaha juga mengartikannya sebagai gabungan *ijab* dan *qabul*, dan penghubungan antara keduanya sedemikian rupa sehingga terciptalah makna atau tujuan yang diinginkan dengan akibat-akibat nyatanya. Dengan demmikian akad adalah

²² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 71

²³ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 51

sesuatu perbuatan untuk menciptakan apa yang diinginkan oleh kedua belah pihak yang melakukan *ijab* dan *qabul*.²⁴

Dalam bahasa Indonesia akad dikenal dengan istilah perjanjian, perikatan, kontrak, atau permufakatan (*al-ittifaq*), dan transaksi. Perjanjian berarti suatu peristiwa yang mana seseorang berjanji kepada orang lain atau pihak lain (perorangan maupun badan hukum) atau suatu peristiwa yang mana dua orang atau pihak saling berjanji untuk melakukan suatu hal.²⁵

Selain pengertian akad berdasarkan Bahasa, pengertian akad juga dapat ditinjau dari dua segi, yaitu pengertian secara umum dan pengertian secara khusus, yaitu:

a. Pengertian secara umum

Pengertian akad secara umum lebih dekat dengan pengertian secara bahasa dan pengertian ini yang tersebar di kalangan *Fuqaha Malikiyyah*, *Syafi'iyah* dan *Hanabillah*, yaitu setiap sesuatu yang ditekadkan oleh seseorang untuk melakukannya baik muncul dengan kehendak sendiri seperti wakaf, *ibra'* (pengguguran hak) talak, dan sumpah. Maupun membutuhkan dalam menciptakannya seperti jual beli dan sewa menyewa.²⁶

b. Pengertian secara khusus

Pengertian akad dalam arti khusus yang dikemukakan ulama fiqh, diantaranya adalah: perikatan yang ditetapkan

²⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh al-Imam Ja'far ash-Shidiq Juz 3&4*, (Jakarta: Lentera, 2009), h. 34.

²⁵ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet. 14, (Jakarta: Intermasa, 1992), h. 1

²⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 4 cet. Ke- 1*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 420

dengan *ijab-qabul* berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya. *Ijab-qabul* adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridaan dalam berakad di antara dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara'". Oleh karena itu, dalam Islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridaan dan syariat Islam.²⁷

Dari beberapa uraian diatas dapat diketahui bahwa yang harus ada dalam akad menurut hukum Islam yaitu adanya pertalian *ijab* dan *qabul* yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan akad. *Ijab* dilakukan oleh pihak yang akan melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, sedangkan *qabul* adalah pernyataan menerima atau menyetujui kehendak yang telah dilakukan pihak pertama. Selanjutnya, akad yang dilakukan harus berdasarkan ketentuan syariat Islam dan tidak boleh melakukan akad terhadap hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT. Setiap akad yang dilakukan itu harus mempunyai akibat hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban yang mengikat para pihak.

2. Dasar Hukum Akad

Dasar hukum akad berdasarkan firman Allah SWT QS. Al Ma'idah (5) ayat (1):

²⁷ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Banung: Pustaka Setia, 2001), h. 43

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ

الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ۚ إِنَّ

اللَّهُ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”. (QS. Al-Ma’idah (5): 1)

Istilah *ahdu* dalam Al-Quran mengacu kepada pernyataan seseorang mengerjakan sesuatu dan tidak ada sangkut-pautnya dengan orang lain, perjanjian yang dibuat seseorang tidak memerlukan persetujuan pihak lain, baik setuju maupun tidak setuju, tidak berpengaruh kepada janji yang dibuat oleh orang tersebut, seperti yang dijelaskan dalam QS. Ali- ‘Imran (3) ayat (76):

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ ۖ وَاتَّقَىٰ ۚ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾

“Sebenarnya barangsiapa menepati janji dan bertakwa, maka sungguh, Allah mencintai orang-orang yang bertakwa”. (QS. Ali- ‘Imran (3): 76)

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa melakukan isi perjanjian atau akad itu hukumnya wajib dan janji yang telah dibuat seseorang baik terhadap manusia maupun terhadap Allah SWT harus ditepati sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan tidak diperkenankan untuk melanggar janji yang telah disepakati.

3. Rukun dan Syarat Akad

a. Rukun Akad

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun akad adalah ijab dan qobul. Adapun orang yang mengadakan akad atau hal-hal lainnya yang menunjang terjadinya akad tidak dikategorikan rukun sebab keberadaannya sudah pasti.²⁸

Setelah diketahui bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhoan masing-masing maka timbul bagi kedua belah pihak *haq* dan *iltijam* yang diwujudkan oleh akad, rukun-rukun akad,²⁹ ialah sebagai berikut:

1) *'Aqid*

'Aqid merupakan orang yang berakad (subjek akad). Terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, dan atau beberapa orang.

2) *Ma'qud 'Alaih*

Ma'qud 'Alaih merupakan benda-benda yang akan di akadkan (objek akad), seperti bena yang dijual

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 46

dalam akad jual beli, dalam akad hiabh atau pemberian, gadai dan hutang.

- a) Objek akad harus ada ketika akad sedang berlangsung, atau ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
- b) Objek akad termasuk barang yang diperbolehkan.
- c) Objek akad harus jelas kelihatan sehingga tidak menimbulkan kesamaran dan penipuan serta perselisihan di kemudian hari, baik sifat, warna, bentuk maupun kualitasnya.
- d) Objek akad dapat diserahterimakan atau ditunda sesuai dengan kesepakatan.
- e) Objek akad dimiliki penuh oleh pemiliknya.³⁰

3) *Maudhu' al'aqid*

Maudhu' al'aqid merupakan tujuan atau maksud pokok mengadakan akad, apabila berbeda akad, maka berbedalah tujuan pokok akad.

4) *Shighat al'aqid*

Shighat al'aqid merupakan ijab dan qabul. Ijab ialah ungkapan yang pertama kali di lontarkan oleh salah satu dari pihak yang akan melakukan akad, sedangkan qabul ialah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.³¹

Shighat al'aqid merupakan rukun akad yang terpenting, karena melalui pernyataan inilah diketahui maksud

³⁰ Endang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), h. 19

³¹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Kencana, 2010), h. 51

setiap pihak yang melakukan akad. *Shighat al'aqid* ini diwujudkan melalui ijab dan qabul.³²

Definisi ijab menurut ulama Hanafiyah adalah penetapan perbuatan tertentu yang menunjukkan keridhaan yang diucapkan oleh orang pertama, baik yang meyerahkan maupun yang menerima, sedangkan qabul adalah orang yang berkata setelah orang yang mengucapkan ijab, yang menunjukan keridhaan atas ucapan orang pertama.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam *Sighat al'aqd*, ialah:

- a) *Sighat al'aqd* harus jelas pengertiannya.
- b) Harus bersesuaian antara ijab dan qabul. Tidak boleh antara yang berijab dan yang menerima berbeda lafadz.
- c) Menggambarkan kesungguhan, kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa dan tidak karena diancam atau ditakut-takuti oleh orang lain karena dalam *tijarah* harus saling ridho.³³

b. Syarat Akad

Syarat adalah sesuatu yang kepadanya tergantung sesuatu yang lain, dan sesuatu itu keluar dari hakikat sesuatu yang lain. Syarat-syarat terjadinya akad merupakan syarat yang melekat pada unsur-unsur pembentuk terjadinya sebuah akad yang ditentukan syara' yang wajib disempurnakan.³⁴ Syarat-syarat terjadinya akad terdiri dari dua macam, yaitu:

³² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 99

³³ Sohari Sahari, *Fiqh Muamalat*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 43

³⁴ Mohammad Nadzir, *Fiqh Muamalah Klasik* (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), h. 34

1) Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam akad. Adapun syarat-syarat umum suatu akad,³⁵ ialah:

- a) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti pengampuan, dan karena boros.
- b) Yang di jadikan objek akad dapat menerima hukumnya. Untuk obyek akad ini disyaratkan pula:
 - (1) berbentuk harta,
 - (2) dimiliki oleh seseorang,
 - (3) bernilai harta menurut syara'.

Oleh sebab itu, jika obyek akad itu sesuatu yang tidak bernilai harta dalam Islam, maka akadnya tidak sah, seperti *khamar* (minuman keras). Disamping itu, jumhur ulama fiqh selain ulama Hanafiyah, menyatakan bahwa barang najis, seperti anjing, bulu dari babi, bangkai dan darah tidak bisa dijadikan obyek akad, karena najis tidak bernilai harta dalam syara'.

- c) Akad itu di izinkan oleh syara', di lakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan *'aqid* yang memiliki barang.
- d) Janganlah akad itu akad yang di larang oleh syara', seperti jual beli *mulasamah*.

³⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, ..., h. 99

- e) Akad dapat memberikan faedah, sehingga tidaklah sah bila *rahn* (gadai) di anggap sebagai imbalan amanah (kepercayaan).
 - f) Ijab itu berjalan terus, tidak di cabut sebelum terjadi qabul. Ijab dan qabul harus bersambung, sehingga bila seseorang yang berijab telah berpisah sebelum adanya qabul maka batal.
- 2) Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam akad, syarat khusus ini juga disebut sebagai *idhafi* (tambahan) yang harus ada disamping syarat-syarat yang umum, seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan. Syarat-syarat yang bersifat khusus diantaranya:
- a) Syarat *ta'liqiyah* ialah syarat yang harus disertakan ketika akad berlangsung, apabila syarat itu tidak ada maka akad pun tidak terjadi. Misal, penjualan tanah berlaku jika disetujui oleh orang tuanya.
 - b) Syarat *taqyid* ialah syarat yang belum dipenuhi namun akad telah terjadi dengan sempurna dan hanya dibebankan oleh salah satu pihak. Misal jual beli mobil dengan ongkos kirim kerumah pembeli dibebankan kepada penjual.
 - c) Syarat *idhafah* adalah syarat yang sifatnya menangguhkan pelaksanaan akad. Contoh ketika mengupahkan rumah dua bulan yang akan datang.³⁶

³⁶ Nur Huda, *Fiqh Muamalah*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), h 115

c. Terbentuknya Akad

Agar unsur-unsur yang membentuk akad dapat berfungsi membentuk akad, maka diperlukan syarat-syarat. Syarat-syarat yang terkait dengan rukun akad ini disebut syarat terbentuknya akad (*syuruth al-in'iqadd*) yaitu:

- 1) Tamyiz
- 2) Berbilang pihak atau pihak-pihak yang beraqad (*at-ta'adud*)
- 3) Persesuaian ijab dan qabul (kesepakatan)
- 4) Kesatuan majlis akad
- 5) Objek akad dapat diserahkan
- 6) Objek akad tertentu atau dapat ditentukan
- 7) Objek akad dapat ditransaksikan (artinya berupa benda bernilai dan memiliki/ *mutaqawwin* dan *mamluk*)
- 8) Tujuan akad tidak bertentangan dengan syara'.

d. Prinsip-Prinsip Akad

Hukum Islam telah menetapkan beberapa prinsip akad yang berpengaruh kepada pelaksanaan akad yang di laksanakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Berikut ini prinsip-prinsip akad dalam Islam:

- 1) Prinsip kebebasan berkontrak.
- 2) Prinsip perjanjian itu mengikat.
- 3) Prinsip kesepakatan bersama.
- 4) Prinsip ibadah.
- 5) Prinsip keadilan dan kesemimbangan prestasi.
- 6) Prinsip kejujuran (amanah).³⁷

³⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta : UII Pres, 1982), h.65

e. Macam-Macam Akad

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa akad itu dapat di bagi dan di lihat dari beberapa segi.

Jika di lihat dari ke absahannya menurut syara', akad di bagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

1) Akad *Shahih*

Akad *shahih* adalah akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad *shahih* ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang di timbulkan akad itu dan mengikat pada pihak-pihak yang berakad.

Ulama Hanafiyah membagi akad *shahih* menjadi dua macam, yaitu:

- a) Akad *nafiz* (sempurna untuk di laksanakan), adalah akad yang di langsunikan dengan memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.
- b) Akad *mawquf*, adalah akad yang di lakukan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad ini, seperti akad yang di langsunikan oleh anak kecil yang *mumayyiz*.

2) Akad *Ghairu Shahih*

Akad *ghairu shahih* adalah akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad. Akad yang tidak

shahih di bagi oleh ulama Hanafiyah dan Malikiyah menjadi dua macam,³⁸ yaitu sebagai berikut:

a) Akad *Bathil*

Akad *bathil* adalah akad yang tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan langsung dari syara'. Misalnya, objek jual beli itu tidak jelas atau terdapat unsur tipuan, seperti menjual ikan dalam lautan, atau salah satu pihak yang berakad tidak cakap bertindak hukum.

b) Akad *Fasid*

Akad *Fasid* adalah akad yang pada dasarnya di syariatkan, akan tetapi sifat yang di akadkan itu tidak jelas. Misalnya, menjual rumah atau kendaraan yang tidak di tunjukkan tipe, jenis, dan bentuk rumah yang akan di jual, atau tidak di sebut brand kendaraan yang di jual, sehingga menimbulkan perselisihan antara penjual dan pembeli.

c) Akad yang mengikat (*lazim*) dan tidak mengikat (*ghair lazim*)

Akad yang mengikat adalah akad yang salah satu pelaku akadnya tidak memiliki hak fasakh (pembatalan) tanpa ada kerelaan pelaku akad lain. Akad bisa dibatalkan jika ada kesepakatan dari kedua belah pihak. Akad yang tidak mengikat adalah akad

³⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*,..., h. 55-56

yang berdasarkan sifatnya bisa dibatalkan (fasakh) oleh salah satu pelaku akad.³⁹

f. Berakhirnya Akad

Berakhirnya akad dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

- 1) Berakhirnya masa berlaku akad itu, apabila akad itu memiliki tenggang waktu.
- 2) Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak mengikat.
- 3) Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad bisa dianggap berakhir jika:
 - a) Jual beli itu *fasad*, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi.
 - b) Berlakunya *khiyar* syarat, *khiyar* aib, atau *khiyar rukyah*.
 - c) Akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak.
 - d) Tercapainya tujuan akad itu secara sempurna.
- 4) Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. Dalam hubungan ini para ulama fiqh menyatakan bahwa tidak semua akad otomatis berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad. Akad yang bisa berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad, diantaranya akad upah mengupah, *ar-rahn*, *al-kafalah*, *ayssyirkah*, *al-wakalah*, dan *al-muzara'ah*.⁴⁰

³⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), 15.

⁴⁰ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah* (Jakarta: Rajawali, 2010), h. 35

Akad yang putus atau batal adalah akad yang sudah sah adanya kemudian dilepaskan ikatan akadnya, baik dengan keinginan maupun tidak. Diakhirinya akad terdapat dua macam sebab, yaitu *fasakh* (pembatalan) dan *infisakh* (batal demi hukum). *Fasakh* adalah melepaskan ikatan akad dari kedua belah pihak baik dengan keinginan sendiri maupun tidak. Sedangkan *infisakh* adalah akad yang dapat melepaskan ikatannya sendiri apabila tidak mungkin diteruskan dan dapat lepas pula ikatan akadnya yang secara terus menerus masih berlaku, seperti akad upah mengupah dan akad pinjam meminjam, apabila benda-benda yang dipinjamkan atau yang diupahkan itu hilang atau tidak ada lagi maka akad dapat lepas dengan sendirinya.⁴¹

Sedangkan akad yang mengikat seperti akad gadai (*rahn*), maka dapat dilepaskan ikatan akadnya dengan kehendak orang yang memegang gadai (*murtahin*), tidak bisa dilepaskan ikatan akadnya atas kehendak rahin.

B. Mudharabah

Gaduh sapi merupakan hubungan kerjasama pengelolaan modal dalam bentuk pemeliharaan hewan ternak seperti sapi, oleh pemilik sapi dengan pihak pemelihara sapi. Dalam muamalat kerjasama pemeliharaan hewan ternak belum dijelaskan secara jelas. Namun dalam hal ini kerjasama pemeliharaan hewan ternak (*gaduh*) sapi dipersamakan dengan *mudharabah*.

⁴¹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah*,... h. 81

1. Pengertian *Mudharabah*

Mudharabah atau *qiradh* termasuk salah satu bentuk akad *syirkah* (perkongsian). *Mudharabah* adalah bahasa penduduk Irak dan *qiradh* atau *muqaradhah* bahasa penduduk Hijaz. Namun, pengertian *qiradh* dan *mudharabah* adalah satu makna.⁴² Istilah *mudharabah* berasal dari kata *dharb* artinya memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang menggerakkan kakinya dalam menjalankan usaha.⁴³ Selain *al-dharb*, disebut juga *qiradh* yang berasal dari kata *alqardhu*, berarti *al-qath* "u (potongan) karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan.⁴⁴ Jadi menurut bahasa *mudharabah* atau *qiradh* berarti *al-qath* "u (potongan), berjalan, atau bepergian. Dengan kata lain proses seseorang untuk mencari nafkah atau menjalankan usaha.

Secara teknis, *al-mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu

⁴² Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*., h. 135

⁴³ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia,

⁴⁴ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, h. 135

diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, sipengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.⁴⁵

Al Mudharabah merupakan kontrak yang melibatkan dua kelompok, yaitu pemilik modal (investor) yang mempercayakan modalnya kepada pengelola (*mudharib*) untuk digunakan dalam aktivitas perdagangan.⁴⁶ Pasal 20 ayat (4) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah disebutkan bahwa *mudharabah* adalah kerjasama antara pemilik dana atau penanam modal dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian usaha berdasarkan nisbah.

Mudharabah dalam buku *Islamic Financial Manajement* dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

Mudharabah adalah akad kerjasama antara pemilik dana (*shahibul mal*), yang menyediakan seluruh kebutuhan modal, dan pihak pengelola usaha (*mudharib*) untuk melakukan suatu kegiatan usaha bersama. Keuntungan yang diperoleh dibagi menurut perbandingan (*nisbah*) yang disepakati. Dalam hal terjadi kerugian, maka di tanggung oleh pemilik modal selama bukan diakibatkan kelalaian pengelola usaha. Sedangkan, kerugian yang timbul karena kelalaian pengelola akan menjadi tanggung jawab pengelola usaha itu sendiri. Pemilik modal tidak ikut campur

⁴⁵ Muhamad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema

Insani Pers, 2001), h. 95

⁴⁶ Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, (Surakarta: Erlangga, 2012), h. 104. ¹¹ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah*, (STAIN Jurai Siwo Meto, 2014), h. 128

dalam pengelola usaha, tetapi mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.⁴⁷

Berdasarkan pemeparan definisi di atas, dapat dipahami bahwa *mudharabah* adalah akad kerjasama antara dua pihak untuk menjalankan usaha atau bisnis tertentu dalam bentuk perdagangan, perindustrian, peternakan, dan lain sebagainya, dimana pihak satu sebagai pemilik modal, kemudian pihak lainnya sebagai pelaksana usaha. Apabila terjadi kerugian maka di tanggung oleh pihak pemilik modal, kecuali kerugian terjadi karena kelalaian yang menjalankan usaha. Sementara apabila usaha tersebut mendapatkan keuntungan, maka dibagi sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak.

2. Dasar Hukum Mudharabah

Seseorang yang melakukan akad *mudharabah* atau *qiradh* adalah boleh (Mubah). Dasar hukum melakukan *mudharabah* terdapat pada Al-Qur'an, As-sunah, Al-Ijma', dan Qiyas.

a. Dalil Al-Qur'an

Firman Allah dalam Surat Al-Muzammil ayat 20:

﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ ۚ وَثُلُثَهُ ۚ وَطَآئِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۚ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۚ عَلِمَ أَن لَّنْ
تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۚ عَلِمَ أَن

⁴⁷*Ibid.*,

سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى ۖ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ
 مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۖ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ فَأَقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ
 مِنْهُ ۚ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۚ
 وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ
 أَجْرًا ۚ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢٠﴾

“Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, Maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai Balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (QS. Al-Muzammil (62): 20)

Firman Allah dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ
فَضْلِ اللَّهِ وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

“Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”. (QS. Al-Jumu'ah (62): 10)

Pada dasarnya ayat-ayat di atas tidak secara langsung menjelaskan *akad mudharabah*, hanya saja secara maknawi mengandung arti kegiatan ekonomi untuk berusaha mencari rezeki dari Allah SWT. Dengan demikian ayat-ayat tersebut bisa dijadikan landasan hukum *akad mudharabah*.

b. Dalil As-Sunah

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرْكََةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعْرِ بِرِ الْلَبِّ
يُتَى لَا لِلْبَيْعِ رَوْه: ابن مجه

“Dari Shalih bin Shuhaib R.A bahwa Rasulullah SAW. Bersabda, “Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur,gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk di jual.”(HR.Ibnu Majah)⁴⁸

⁴⁸ A. Hasan, *Tarjamah Bulughul Maram*, (Bandung: Diponegoro, 2006), h. 400 ¹⁶Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h.139.

Hadist di atas secara jelas menjelaskan bahwa ada tiga perkara yng terdapat keberkahan di dalamnya, salah satu diantaranya adalah *muqaradhah* (*mudharabah*) yakni memberi modal.

Selain itu landasan dari *As-Sunnah Taqririyah*, yaitu Rasulullah sebelum diangkat menjadi Rasul, beliau pernah melakukan akad *mudharabah* (bagi hasil) dengan harta Khadijah ke Negri Syam untuk menjual barang-barang milik Khadijah r.a. yang kemudian menjadi istrinya.¹⁶

c. Dalil Ijma’

Di antara Ijma’ dalam *mudharabah*, adanya riwayat yang menyatakan bahwa jemaah dari sahabat menggunakan harta anak yatim untuk *mudharabah*. Perbuatan tersebut tidak ditentang oleh sahabat yang lain.

Hukum *mudharabah* ini juga dilandaskan pada kaidah fiqih yang berbunyi:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali jika terdapat dalil yang mengharamkannya”.

Kaidah usul fiqih ini menjelaskan bahwa hukum suatu persyaratan tergantung pada hukum pokok perkaranya, apabila hukum asal suatu perkara dilarang maka hukum asal menetapkan syarat juga dilarang dan begitu juga sebaliknya. Dalam perkara muamalah, hukum asalnya adalah

diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarang, maka seseorang tidak diperkenankan untuk melarang suatu persyaratan yang telah disepakati dalam akad muamalah kecuali jika terdapat dalil yang menunjukkan larangan pada persyaratan tersebut.

Sedangkan hukum *qiyas* pada akad *mudharabah* dianalogikan kepada akad *Al-Musaqat* yaitu salah satu bentuk akad kerjasama yang digunakan pada sektor pertanian, dimana pemilik dan pengelola tanah melakukan kontrak kerjasama (kongsi) pada lahan pertanian dengan imbalan hasil panen yang disepakati. Dimana sebagian dari pihak memiliki modal yang cukup tetapi tidak memiliki keahlian atau kompetensi yang dibutuhkan, dan di pihak lain mempunyai keahlian atau kompetensi yang baik tetapi tidak mempunyai modal yang memadai untuk mengelola suatu usaha. Dengan demikian, melalui akad ini akan menjembatani pihak-pihak yang memiliki modal dan keahlian untuk saling bekerjasama sesuai kemampuan, sehingga dapat memenuhi kebutuhannya sesuai dengan nilai dan prinsip syariah yang diturunkan oleh Allah SWT.

3. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

a. Rukun *Mudharabah*

Menurut ulama' Syafi'iyah, rukun *qiradh* atau *mudharabah* ada enam yaitu:

- 1) Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya

- 2) Orang yang bekerja, yaitu mengelola harta yang diterima dari pemilik barang
- 3) Akad *mudharabah*, dilakukan oleh pemilik dan pengelola barang
- 4) Maal, yaitu harta pokok atau modal
- 5) Amal, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba Keuntungan⁴⁹

Menurut Pasal 232 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, Rukun *mudharabah* ada tiga yaitu, sebagai berikut:

Menurut ulama' Syafi'iyah, rukun *qiradh* atau *mudharabah* ada enam yaitu:

- 1) Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya
- 2) *Shahib al-mal*/ pemilik modal
- 3) *Mudharib/pelaku usaha* Akad⁵⁰

Menurut Sayid Sabiq, rukun *mudharabah* adalah ijab dan qabul yang keluar dari orang yang memiliki keahlian.

b. Syarat *Mudharabah*

Syarat-syarat *mudharabah* berhubungan dengan rukun-rukun *mudharabah* itu sendiri yaitu sebagai berikut:

- 1) Pelaku (pemilik modal maupun pengelola usaha)

Syarat yang terkait dengan para pihak yang berakad yakni: kedua belah pihak yang berakad, pemilik modal (*sahibul mal*) dan pengelola modal (*mudharib*)

h. ⁴⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012),

⁵⁰ *Ibid.*,

harus cakap bertindak atau cakap hukum, berakal baligh, dalam akad *mudharabah* kedua belah pihak yang berakad tidak disyaratkan harus muslim.⁵¹

2) Objek *mudharabah* (modal dan kerja)

Syarat yang terkait dengan modal:

a) Diketahui jumlahnya secara jelas

Ketidakjelasan modal akan berakibat pada ketidakpastian keuntungan, sementara kejelasan modal merupakan syarat sah *mudharabah*.⁵²

b) Jenisnya (mata uang)

Modal harus berupa uang atau mata uang yang berlaku di pasaran. Menurut mayoritas ulama' modal dalam *mudharabah* tidak boleh berupa barang, baik bergerak maupun tidak, karena barang tidak dapat dipastikan taksiran harganya dan mengakibatkan ketidakpastian (*gharar*) besarnya modal *mudharabah*. Namun para ulama' mazhab Hanafi membolehkannya dan nilai barang yang dijadikan setoran modal harus disepakati pada waktu akad oleh *mudharib* dan *shahibul mal*.⁵³

c) Modal harus disetor kepada *mudharib*

Modal harus diserahkan kepada pihak pengelola modal atau pengelola usaha (*mudharib*),

⁵¹ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah* ..., h. 132.

⁵² Imam Mustofa, *Fiqh Muamala* ..., h. 133.

⁵³ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 206

bila modal tidak diserahkan maka akad *mudharabah* rusak.

d) Modal harus ada

Modal harus ada, bukan berupa utang, tetapi tidak berarti harus ada di tempat akad. Juga dibolehkan mengusahakan harta yang dititipkan kepada orang lain, seperti mengatakan, “*ambil harta saya di si fulan kemudian jadikan modal usaha*”⁵⁴

e) Persetujuan kedua belah pihak (*ijab-Qabul*)

Syarat yang terkait dengan Ijab Qabul : Melafazkan ijab dari pemilik modal, misalnya aku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang jika ada keuntungan akan dibagi dua dan kabul dari pengelola.

f) Nisbah Keuntungan

Persyaratan yang terkait dengan keuntungan atau laba dalam akad *mudharabah* adalah sebagai berikut:

- (1) Jumlah keuntungan harus jelas. Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasenya, umpama setengah, sepertiga, atau seperempat. Sebagai tambahan untuk syarat pada poin satu diatas, disyaratkan juga bahwa proporsi atau presentase pembagian hasil dihitung hanya dari keuntungan, tidak termasuk modal.

⁵⁴Rahmad Syaifei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 228

- (2) Keuntungan tidak boleh dihitung berdasarkan presentase dari jumlah modal yang diberikan *shahibul mal*. Tidak boleh menentukan jumlah tertentu untuk pembagian hasil misalnya Rp. 1000.000, atau Rp. 5000.000 dan seterusnya. Karena keuntungan atau hasil yang akan diperoleh belum diketahui jumlahnya.⁵⁵

4. Jenis-jenis *Mudharabah*

Secara umum *mudharabah* terbagi kepada dua jenis: *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.⁵⁶

a. *Mudharabah Muthlaqah*

Yang dimaksud dengan transaksi *mudharabah muthlaqah* adalah bentuk kerjasama antara *shahib al-mal* dan *mudharib* yang cangkupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqih Ulama' salafus shaleh sering kali dicontohkan dengan ungkapan *if'al ma syi'ta* (lakukanlah sesukamu) dari *shahibul mal* ke *mudharib* yang memberi kekuasaan sangat besar.

Pada jenis *mudharabah muthlaqah* ini, *mudharib* tidak dibatasi dengan spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah. Oleh karena itu *mudharib* memiliki kekuasaan penuh terhadap usaha yang dijalankan dan *shahibul mal* hanya berhak mengawasi atas jalanya usaha tersebut.

⁵⁵ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (STAIN Jurai Siwo Meto, 2014), h.

⁵⁶ Muhamad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, h. 97

b. *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah muqayyadah atau disebut juga dengan istilah *restricted mudharabah/specified mudharabah* adalah kebalikan dari *mudharabah muthlaqah*. Si *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu dan tempat usaha. Adanya pembatasan ini sering kali mencerminkan kecenderungan umum si *shahibul mal* dalam memasuki jenis dunia usaha.

Pada *mudharabah muqayyadah* ini *mudharib* dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan tempat usaha. Sehingga *mudharib* harus menjalankan usaha sesuai dengan batasan yang telah diberikan oleh *shahibul mal*. Dengan demikian kekuasaan yang dimiliki oleh *mudharib* hanya sebatas menjalankan usaha saja.

5. Konsep *Mudharabah* di Indonesia

Konsep *Mudharabah* di Indonesia menurut Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang dimaksud dengan akad *Mudharabah* dalam pembiayaan adalah akad kerja sama dalam suatu usaha antara pihak pertama (*malik, shahibul maal*, Bank Syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (*'amil, mudharib, Nasabah*) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh Bank Syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.

Konsep *mudharabah* kontemporer yang ada saat ini telah banyak mengalami transformasi. Jika pada konsep *mudharabah* klasik, *mudharabah* hanya dilakukan dengan satu jenis atau bentuk, maka pada konsep *mudharabah* kontemporer dapat digabungkan dengan akad lain seperti dengan akad *murabahah* atau *musyarakah*, hal tersebut untuk menyesuaikan dengan keadaan masyarakat serta dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan layanan jasa perbankan syariah yang baik. Mekanisme *mudharabah* kontemporer saat ini berbeda dengan praktik *mudharabah* klasik atau terdahulu. Pada konsep *mudharabah* klasik tidak terdapat mekanisme angsuran dalam pembayaran modal pokok yang dikelola *mudharib* kepada *shahibul maal*, pembayaran modal pokok yang diterima oleh *mudharib* dari *shahibul maal* tersebut hanya dilakukan satu kali di akhir periode kontrak. Hal ini juga berlaku untuk mekanisme pembayaran bagi hasil pada akad *mudharabah*, dimana pembayaran bagi hasil *mudharabah* dilakukan satu kali di akhir periode kontrak.

6. Batalnya *Mudharabah*

Mudharabah dianggap batal pada hal berikut:⁵⁷

a. Pembatalan, Larangan Berusaha, dan Pemecatan

Mudharabah menjadi batal dengan adanya pembatalan *mudharabah*, larangan untuk mengusahakan (*tasharruf*), dan pemecatan. Semua ini jika memenuhi syarat pembatalan dan larangan, yakni orang yang melakukan akad

⁵⁷ Rahmad Syafei, *Fiqih Muamalah*, h. 237.

mengetahui pembatalan dan pemecatan tersebut, serta modal telah diserahkan ketika pembatalan atau larangan.

b. Salah seorang *Aqid* meninggal dunia

Jumhur ulama' berpendapat bahwa *mudharabah* batal, jika salah seorang *aqid* meninggal dunia, baik pemilik modal maupun pengusaha.

c. Salah seorang *Aqid* gila

Jumhur ulama berpendapat bahwa gila membatalkan *mudharabah* sebab gila atau sejenisnya membatalkan keahlian dalam *mudharabah*.

d. Pemilik modal murtad

Apabila pemilik modal murtad (keluar dari Islam) atau terbunuh dalam keadaan murtad, atau bergabung dengan musuh serta telah diputuskan oleh hakim pembelotannya, menurut Imam Abu Hanifah, hal itu membatalkan *mudharabah* sebab bergabung dengan musuh sama saja mati.

e. Modal rusak di tangan pengusaha

Jika harta rusak sebelum dibelanjakan, *mudharabah* menjadi batal. Hal ini karena modal harus dipegang oleh pengusaha. Jika modal rusak *mudharabah* batal. Begitu pula, *mudharabah* dianggap rusak jika modal diberikan kepada orang lain atau dihabiskan sehingga tidak tersisa untuk di usahakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 4 cet. Ke- 1*. Jakarta: Gema Insani.
- Akbar, H. U. (2008). *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Al-Munawar, S. A. H. (2004). *Hukum islam dan Pluralitas Sosial*. Jakarta: Penamadania.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Insani Pers.
- Anwar, S (2010). *Hukum Perjanjian Syari'ah*. Jakarta: Rajawali.
- Anwar, S. (2007). *Hukum perjanjian Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Azzam, A. A. (2010). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- Basyir, A. A. (2000). *Asas-Asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta: Rajawali Pers.
- Djuwaini, D. (2010). *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Kencana.
- Ghazaly, A. R. (2010). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana.
- Hakim, L. (2012). *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Surakarta: Erlangga.
- Haroen, N. (2007). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Hasan, A. (2006). *Tarjamah Bulughul Maram*. Bandung: Diponegoro.
- Hidayat, E. (2016). *Transaksi Ekonomi Syariah*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Huda, N. (2015). *Fiqh Muamalah*. Semarang: Karya Abadi Jaya.

- Janwari, Y. (2015). *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Karim, A. A. (2008). *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Koentjaraningrat. (1995). *Historiografi Indonesia Sebuah Pengantar*. Jakarta: Gramedia.
- Mardani. (2012). *Ayat-Ayat dan Hadist Ekonomi Syariah, cet.2*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mardani. (2015). *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*. Jakarta: Kencana.
- Mughniyah, M. J. (2009). *Fiqh al-Imam Ja'far ash-Shidiq Juz 3&4*. Jakarta: Lentera.
- Muthiah, A. (2017). *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Musanet, N. S. (1989). *Pedoman Membuat Skripsi*. Jakarta: Gunung Agung.
- Mustofa, I. (2016). *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nadzir, M. (2015). *Fiqh Muamalah Klasik*. Semarang: Karya Abadi Jaya.
- Narbuko, C. (2007). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara
- Nawawi, I. (2012). *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Graha Indonesia.
- Sahari, S. (2011). *Fiqh Muamalat*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Subekti. (1992). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Suhendi, H. (2014). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syafe'i, R. (2001). *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.

- Tika, P. (2006). *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Waluyo, B. (2002). *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zuriah, N. (2007). *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan*. Jakarta: PT Bumi Aksar.
- Vera Dilla Anggraeni, “Praktik Bagi Hasil Gaduh Sapi Ditinjau Dari Hukum Islam: di Desa Wirokerten, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul (Skripsi, Universitas Muhamadiyah Ygyakarta, 2016), xv.
- Abdur Rohman A, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Bagi Hasil Pemeliharaan Hewan Ternak: di Desa Sukadanya Jaya Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metr, 2020), vi.
- Pengertian Gaduh” (On-line), tersedia di: <https://kbbi.web.id/kelola.html>.
- Unsur-unsur mudharabah, <https://zonaekis.com/unsur-unsur-mudharabah/>.

